



EDISI JUMAT 31 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY
KPR 40 Tahun Resmi Berlaku, Cicilan Bisa di
Bawah Rp1 Juta

04

NUSANTARA
Kejagung Akan Titipkan Ferry ke LPSK Demi Keamanan,
Saksi Kunci TPPU Febrie?

10

LISTSTYLE
Dupe Culture, Bukan Barang KW tapi Duplikasi

MK KETOK PALU: MAKAN GRATIS DILARANG CAPLOK DANA PENDIDIKAN

Perdebatan panjang mengenai dari mana uang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil akhirnya diketok palu oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang putusan perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 pada Kamis (30/7/2026), majelis hakim menegaskan pos pembiayaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dilarang lagi mencaplok jatah mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN. Sorotan tajam tersebut tidak terlepas dari besarnya porsi dana pendidikan yang tersedot untuk belanja pangan harian dalam APBN 2026. Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp223,6 triliun atau hampir 30 persen di antaranya untuk membiayai MBG melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Meski demikian, MK memberikan masa transisi hingga 2028 bagi pemerintah untuk memisahkan pos anggaran tersebut secara penuh. Tenggat waktu yang dinilai terlalu lama ini memicu kritik keras dari pengamat dan kelompok sipil. Putusan hakim dilabeli sebagai sebuah "kemenangan semu". Pasalnya, dana sekolah masih akan terus tergerus dalam dua tahun anggaran ke depan. Padahal penderitaan sektor pendidikan murni kini banyak yang membutuhkan dana mendesak. Mulai untuk rehabilitasi ribuan sekolah rusak hingga perbaikan kesejahteraan guru honorer. BACA HAL 11...

MAKAN BERGIZI GRATIS

DALAM ANGKA

1. Tahun Anggaran 2025

- Pagu anggaran: **Rp71 triliun**
- Realisasi: **Rp51,5 triliun (72,5%)**
- Tunggakan mitra: **Rp1,6 triliun (dibayar setelah audit 2026)**
- Penerima manfaat: **56,13 juta orang**

2. Tahun Anggaran 2026

- Pagu anggaran: **Rp335 triliun**
- Realisasi per Maret: **Rp44 triliun (13,1%)**
- Penerima manfaat April/Mei: **61,96 juta orang (74,74% dari target 82,9 juta)**
- SPPG aktif: **27.427 unit**
- Target tambahan: **13.000 SPPG, prioritas wilayah 3T**

3. Putusan MK (30 Juli 2026)

- MBG tetap sah dan konstitusional sebagai program
- prioritas nasional.
- Dana pendidikan tak boleh lagi digunakan untuk MBG. Pada APBN 2026, **Rp223,6 triliun dana MBG**
- masih berada di pos pendidikan (**sekitar 29,1% dari anggaran pendidikan Rp769,1 triliun**).
- Pemisahan anggaran MBG ke pos tersendiri wajib dilakukan paling lambat APBN 2028.

BEM UI gelar konpers di Gedung MK desak pemerintah agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisah dari anggaran Pendidikan, Kamis (30/7/2026). (ist)



KPR 40 TAHUN RESMI BERLAKU, CICILAN BISA DI BAWAH RP1 JUTA

Pemerintah resmi mulai menerapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun. Melalui kebijakan ini, cicilan rumah subsidi diperkirakan dapat ditekan menjadi di bawah Rp1 juta per bulan sehingga diharapkan semakin memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Meski tenor diperpanjang, pemerintah menegaskan masyarakat tetap bebas memilih jangka waktu kredit sesuai kemampuan, mulai dari 10 tahun hingga maksimal 40 tahun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan implementasi kebijakan tersebut telah siap dijalankan setelah dikoordinasikan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta seluruh pemangku kepentingan. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian akad massal sekitar 62 ribu unit KPR rumah subsidi--sebanyak 62.710 unit menurut data pemerintah--di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026), yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

"Arahan Bapak mengenai tenor KPR hingga 40 tahun juga sudah dapat dijalankan bersama BP Tapera, Kementerian Keuangan, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan," kata Maruarar.

Maruarar menegaskan tenor 40 tahun bukan kewajiban. Masyarakat tetap dapat memilih masa cicilan 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun,



atau hingga 40 tahun sesuai kemampuan finansial.

"Namun masyarakat tetap diberikan pilihan. Mau tenor 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, atau sampai 40 tahun, semuanya tersedia. Kami memberikan pilihan kepada rakyat," ujarnya.

"Dengan ini akan banyak peminatan untuk rumah subsidi karena kan cicilannya bisa lebih rendah, bisa di bawah Rp1 juta," tegas Maruarar.

Selain memberikan tenor lebih panjang, pemerintah memastikan bunga KPR subsidi melalui skema

Skema KPR Subsidi

- Tenor hingga 40 tahun (opsional, bukan wajib)
- Pilihan tenor: 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40 tahun
- Cicilan mulai sekitar Rp500 ribu-Rp700 ribu/bulan
- Bunga tetap (fixed) hingga lunas:
 - Rumah tapak: 5%
 - Rumah susun: 6%
- Tenor 40 tahun hanya untuk rumah tapak subsidi
- Pelunasan dipercepat setelah minimal 5 tahun akad
- Gratis PBG & BPHTB
- Wajib tanam minimal 1 pohon di setiap rumah subsidi.



Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap sebesar 5 persen, meski suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) telah naik menjadi 5,75 persen.

"BI Rate sudah 5,75 persen, tetapi bunga rumah subsidi tetap 5 persen. Ini adalah arahan Bapak Presiden agar masyarakat tetap bisa memiliki rumah dengan cicilan yang terjangkau," ujar Maruarar.

Ia mengatakan pemerintah terus menjaga agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh akses pembiayaan rumah yang terjangkau. Selain bunga tetap 5 persen, pemerintah juga memberikan uang muka (down payment/DP) hanya 1 persen serta perlindungan asuransi bagi debitur.

"Penerima rumah subsidi juga mendapatkan perlindungan asuransi. Jika terjadi musibah pada debitur, keluarga tetap memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif lain untuk menekan biaya kepemilikan rumah, antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penggratiskan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

"PBG yang sebelumnya berbayar kini digratiskan untuk MBR. BPHTB juga dibebaskan. Ditambah PPN DTP dan bunga tetap 5 persen sehingga biaya memiliki rumah semakin ringan," jelasnya. (gus,ant,rls/dya)

Belajar dari India, Prabowo Mau 3 Juta Rumah/Tahun

PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tengah mencari berbagai terobosan untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempelajari keberhasilan sejumlah negara yang dinilai mampu menyediakan hunian rakyat dalam skala besar, terutama India yang berhasil membangun sekitar 40 juta rumah dalam 12 tahun atau rata-rata tiga juta rumah setiap tahun. Menurut Prabowo, pengalaman tersebut layak menjadi referensi untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia.

"Saya tertarik pada pengalaman bangsa India. Mereka mampu membangun 40 juta rumah dalam 12 tahun, atau kira-kira 3 juta rumah setiap tahun. Ini sedang saya pelajari, bagaimana caranya. Ada teknik-teknik tertentu, dan ini bisa kita

coba," kata Prabowo saat menghadiri akad massal 62.710 unit KPR rumah subsidi FLPP dan penyaluran KUR Perumahan di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengadopsi praktik terbaik dari negara lain selama terbukti efektif. Ia menyebut cara-cara yang telah berhasil akan dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia untuk mempercepat pembangunan sektor perumahan nasional.

"Kalau bangsa kita mau bangkit dan bertransformasi, kita tidak boleh malu untuk belajar dari siapa pun," ujarnya.

Untuk itu, Presiden mengaku telah mengirim tim ke beberapa negara, yakni Tiongkok, India, dan Mesir, guna mempelajari teknologi, metode konstruksi, serta tata kelola pembangunan perumahan yang

dinilai berhasil. Hasil pembelajaran tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Indonesia.

"Saya kirim tim ke Tiongkok, tim ke India, tim ke Mesir untuk melihat, mencatat, dan belajar. Kita ambil yang terbaik dari bangsa-bangsa lain," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui konsep Indonesia Incorporated, yakni sinergi antara pemerintah, perbankan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar target penyediaan rumah bagi masyarakat dapat dicapai lebih cepat.

"Inilah yang kita maksud dengan Indonesia Incorporated: yang besar membantu yang kecil, dan yang kecil bekerja keras untuk menjadi produktif," ujar Prabowo. (wud,rls/dya)

USUL DPR: WAKIL KEPALA DAERAH TAK DIPILIH LEWAT PILKADA, TAPI DITUNJUK

Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali mengemuka di DPR. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan agar posisi wakil kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, masyarakat cukup memilih kepala daerah, sedangkan wakil kepala daerah ditunjuk oleh kepala daerah terpilih. Salah satu alasannya, karena banyak pasangan kepala daerah yang tidak harmonis usai terpilih.

Usulan tersebut disampaikan Khozin dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Menurutnya, evaluasi terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah diperlukan karena persoalan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah terus berulang di berbagai daerah.

"Ini terkait dengan wakil kepala daerah. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pilkada Nomor 6 Tahun 2020, bagaimanapun cara pandang penyelesaiannya ini ada dua. Apakah kita lakukan revolusi perbaikan terkait dengan aturannya atau kemudian kita ubah sistem Pilkadanya," kata Khozin.

Ia menilai, berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini, posisi wakil kepala daerah hanya menjalankan fungsi delegatif, bukan fungsi instruktif. Akibatnya, kewenangan wakil kepala daerah sepenuhnya bergantung pada pelimpahan tugas dari kepala daerah.

"Kenapa? Kalau by regulation terkait wakil kepala daerah itu hanya



Tangkapan layar - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin (layar) berbicara dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri serta kepala dan wakil kepala daerah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/7/2026). (TVR Parlemen)

menjalankan fungsi delegatif bukan fungsi instruktif. Selama delegasi itu tidak diberikan oleh kepala daerah, maka wakil kepala daerah tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak punya peran apa-apa," ujarnya.

Menurut Khozin, kondisi tersebut membuat banyak wakil kepala daerah tidak memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan tugas pemerintahan secara optimal selama masa jabatan lima tahun.

"Jadi lima tahun ya ngedokem saja di ruangan atau cuma hadir dalam forum-forum yang sifatnya tahunan. Lah ini kan tidak boleh dibiarkan sesuatu yang memang sudah tidak sesuai dengan semangat iklim demokrasi kita, dengan semangat otonomi daerah kita, penguatan daerah," katanya.

Atas dasar itu, politikus PKB tersebut menawarkan dua pilihan penyelesaian, yakni memperbaiki pengaturan mengenai kewenangan wakil kepala

daerah atau mengubah sistem Pilkada melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam opsi kedua, masyarakat hanya memilih kepala daerah, sementara kepala daerah terpilih diberi kewenangan menunjuk wakilnya.

"Terus solusi yang kedua seperti apa? Ya perbaiki Undang-Undang Pilkadanya. Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah," ujar Khozin.

Ia menilai skema tersebut juga dapat mengakhiri praktik menjadikan calon wakil kepala daerah semata-mata sebagai pendulang suara saat Pilkada.

"Jadi ini biar tidak menjadi vote getter saja, kasihan wakil kepala daerah saat ini," ucapnya.

Khozin mengungkapkan, persoalan mengenai terbatasnya kewenangan wakil kepala daerah sebelumnya juga telah disampaikan oleh asosiasi wakil kepala daerah saat beraudiensi dengan Komisi II DPR. Meski isu itu tidak kembali disampaikan dalam rapat bersama pemerintah, ia menegaskan akar persoalannya terletak pada desain sistem, bukan individu yang menjabat.

"Kemarin kita menerima di Komisi II asosiasi wakil kepala daerah, walaupun tadi diberikan waktu tidak keluar bahasa itu, entah mungkin sungkan ke pimpinan atau seperti apa, saya ingin me-reminder bahwa problem ini adalah problem by system, bukan by person," katanya.

Khozin juga menyoroti tingginya angka disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan data yang dimiliki Komisi II DPR, hampir 60 persen pasangan kepala daerah mengalami ketidakharmonisan setelah terpilih.

"Karena hampir 60 persen data yang kita miliki di daerah itu disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah," ungkapnya.

Menurut dia, konflik tersebut tidak hanya mengganggu hubungan internal pemerintahan daerah, tetapi juga berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan karena kepala daerah kerap disibukkan dengan polemik dan klarifikasi kepada publik.

"Apakah ini berkorelasi dengan tema pembahasan kita? Sangat berkorelasi. Jadi bagaimana kepala daerah itu banyak disibukkan urusan klarifikasi-klarifikasi kepada publik terkait dengan disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah," pungkasnya. (tin, kum/dya)

Gaji Berbasis Kinerja

KOMISI II DPR RI mendorong pemerintah mereformulasi sistem penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perubahan itu dinilai mendesak karena dasar hukum yang mengatur hak keuangan kepala daerah masih menggunakan regulasi yang diterbitkan lebih dari dua dekade lalu, sementara beban dan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus meningkat.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ketentuan mengenai hak keuangan kepala daerah hingga kini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan daerah saat ini.

"Karena itu, kami juga mendorong agar dilakukan reformulasi terhadap hak keuangan kepala daerah dan wakil

kepala daerah secara proporsional dan berbasis capaian kinerja," kata Rifqi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut Rifqi, sistem remunerasi kepala daerah sebaiknya tidak lagi disamaratakan. Besaran hak keuangan, kata dia, perlu dikaitkan dengan hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan dan kinerja masing-masing kepala daerah sehingga mekanisme penghargaan dan evaluasi dapat berjalan lebih objektif.

Dalam skema tersebut, kepala daerah yang dinilai mampu mencapai target pembangunan dapat memperoleh penghargaan berupa penghasilan yang lebih layak. Sebaliknya, kepala daerah yang gagal memenuhi target juga perlu mendapatkan evaluasi melalui mekanisme yang disusun pemerintah.

"Kita tentu ingin memberi penghargaan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja

baik, tetapi juga kita tidak boleh tidak memberikan punishment kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memang belum mencapai capaian," ujarnya.

Rifqi menegaskan DPR hanya mendorong perubahan kebijakan secara umum, sedangkan penyusunan formula rinci mengenai sistem penghasilan berbasis kinerja tetap menjadi kewenangan pemerintah. Ia berharap regulasi baru nantinya mampu menciptakan sistem remunerasi yang lebih proporsional bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.

Selain meningkatkan keadilan dalam pemberian hak keuangan, Rifqi menilai reformulasi tersebut juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk menekan potensi penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. (tin, rls/dya)

KEJAGUNG AKAN TITIPKAN FERRY KE LPSK DEMI KEAMANAN, SAKSI KUNCI TPPU FEBRIE?

Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana menitipkan pengusaha Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry "Boboho" kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Langkah itu diambil setelah Ferry menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, Kamis (30/7/2026). Alasannya demi keamanan dan kelancaran penyelidikan.

PARA TERSANGKA

Febrie Adriansyah

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang menjadi tersangka utama atas dugaan korupsi (terkait kasus PT Krakatau Steel, PLTU PLN, dan PT Asabri) serta TPPU kepemilikan 74 kg emas dan valuta asing.

Don Ritto

Pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan pengembangan perkara korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah.

Nurman Herin (NH)

Pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka baru atas dugaan turut serta dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)



Tersangka baru kasus TPPU menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Nurman Herin (NH) mengenakan rompi tahanan digiring keluar dari Gedung Utama Kejaksaan menuju mobil tahanan, Kamis (30/7/2026) malam. (Ist)

Nama Ferry Yanto Hongkiriwang mulai menjadi perhatian publik sejak penyelidikan dugaan korupsi yang semula ditangani Kortastipidkor Polri. Ferry dikenal sebagai pengusaha yang pernah menjadi rekan bisnis Don Ritto dalam pengelolaan restoran Gontran Cherrier, yang kemudian berganti nama menjadi de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Restoran tersebut termasuk lokasi yang digeledah penyidik pada Juli lalu.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita uang tunai berbagai mata uang dengan nilai mendekati Rp60 miliar, terdiri atas 3,13 juta dolar Singapura, 889.695 dolar Amerika Serikat, serta Rp256,16 juta dalam bentuk rupiah. Selain bergerak di sektor kuliner, Ferry juga diketahui memiliki bisnis perdagangan produk logam dan disebut memiliki keterkaitan dengan perusahaan distributor PT Krakatau Steel, meski hingga kini Kejagung belum menyatakan keterlibatannya sebagai tersangka.

Di luar dunia usaha, Ferry dikenal sebagai kolektor mobil sport kelas atas. Dari Honda Civic Type R FK8 edisi terbatas, deretan Mitsubishi Evo, Nissan GT-R, hingga Mercedes-Benz AMG dan Porsche pernah menghiasi garasinya. Ia bahkan disebut menyewa basement sebuah mal sebagai garasi pribadi. Hobi otomotif itulah yang melahirkan julukan "Boboho" yang melekat padanya.

Perkara hukum Ferry Boboho bermula dari insiden penguntitan pada Jumat, 25 Juli 2025. Saat itu,

anggota Densus 88 Antiteror Polri, Briptu Faisal Faizurrahman, kedatangan mengintai Ferry yang tengah makan siang bersama rekannya di Bogor Cafe, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Menyadari dirinya diawasi dan difoto, Ferry membanting ponsel milik Briptu Faisal, lalu menghubungi seorang petinggi TNI untuk melaporkan penguntitan tersebut.

Tak lama berselang, personel Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI datang ke lokasi dan membawa Briptu Faisal sekitar pukul 14.00 WIB. Anggota Densus 88 itu diduga sempat disekap dan mengalami penganiayaan selama beberapa hari sebelum akhirnya dibebaskan, menyusul pertemuan tingkat tinggi antara petinggi Polri dan BAIS TNI.

Buntut insiden ini, Ferry ditangkap polisi di sebuah apartemen elite kawasan Mega Kuningan pada Senin, 28 Juli 2025, dengan status tersangka dugaan penculikan, penganiayaan, dan perintangan penyidikan.

Insiden penguntitan terhadap Ferry ternyata bukan kejadian pertama. Setahun sebelumnya, pada Minggu, 19 Mei 2024, dua personel Densus 88 juga tertangkap membuntuti Febrie Adriansyah saat bersantap malam di restoran milik Ferry di Cipete. Sejak peristiwa 2025 itu, kediaman Febrie di Kebayoran Baru mulai dijaga ketat personel TNI bersenjata, yang belakangan menuai kritik publik karena dianggap tak lazim untuk seorang pejabat sipil.

Status Ferry saat ini masih sebagai

saksi yang keterangannya dinilai penting untuk mengusut dugaan TPPU dalam perkara Febrie Adriansyah.

Rencana penitipan Ferry diumumkan bersamaan dengan perkembangan terbaru penyidikan kasus TPPU yang menyeret Febrie Adriansyah. Pada hari yang sama, Kejagung juga menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka baru. Penyidik menduga Nurman turut berperan dalam tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sebelumnya, Kejagung telah menahan Febrie Adriansyah di Rumah Tahanan KPK untuk masa penahanan awal selama 20 hari.

Menurut Rudi Margono, penempatan mantan Jampidsus itu di Rutan KPK juga didasarkan pada pertimbangan perlindungan karena Febrie selama bertugas menangani berbagai perkara besar. Selain aspek keamanan, penitipan tahanan itu disebut bertujuan menjaga akuntabilitas dan transparansi proses hukum serta memperkuat koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya menegaskan bahwa penitipan tahanan antarlembaga penegak hukum bukan merupakan hal baru. Menurut dia, mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan. "Sebelumnya ada, memang ada. Hal demikian memang ketika ada kebutuhan dalam proses penyidikan itu terbuka kemungkinan. Termasuk KPK juga beberapa kali melakukan penitipan penahanan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (24/7/2026).

Nama Nurman bukan sosok baru dalam pusaran dugaan pencucian uang yang dikaitkan dengan Febrie. Penelusuran dokumen yang sebelumnya dipublikasikan mencatat Nurman muncul dalam struktur sejumlah perusahaan bersama Don Ritto dan pihak-pihak yang disebut dekat dengan mantan Jampidsus tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ketika itu menyebut Nurman sebagai salah satu pihak yang diduga berperan sebagai penjaga gerbang atau gatekeeper jaringan bisnis Febrie. (tin,ist,kum/dya)

Koordinator Tim 9 Kejagung yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Rudi Margono, mengatakan penitipan tersebut dilakukan untuk menunjang proses penyidikan sekaligus menjamin keselamatan saksi. "Untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan kita berencana akan menitipkan kepada LPSK," kata Rudi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Rudi belum mengungkap secara rinci posisi hukum Ferry dalam perkara tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa penyidik masih membutuhkan keterangan Ferry sebagai saksi sehingga perlindungan dinilai diperlukan. "Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan, kita titipkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban," ujarnya.

Saat ditanya apakah rencana perlindungan itu berkaitan dengan kemungkinan Ferry mengajukan status justice collaborator (JC), Rudi enggan memberikan jawaban pasti. Menurut dia, penyidik masih terus mengembangkan perkara. "Nanti tunggu perkembangan. Yang jelas kita masih membutuhkan keterangan sebagai saksi untuk kelancaran penyidikan dan untuk perlindungan keamanan bagi yang bersangkutan," ucapnya.

PRABOWO BERI SINYAL BAWA DESTRY KE DPR, DIAJUKAN JADI GUBERNUR BI

Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal kuat bahwa nama Pejabat Gubernur Sementara (PGS) Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski demikian, Prabowo belum secara eksplisit menyatakan bahwa pengajuan tersebut berkaitan dengan pencalonan Destry sebagai Gubernur Bank Indonesia definitif.

PROFIL SINGKAT DESTRY DAMAYANTI

- Menjabat sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia sejak 2019, dan diperpanjang pada 2024.
- Ditunjuk sebagai Pejabat Gubernur Bank Indonesia setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri.

Rekam Jejak Karier

- Asisten Peneliti Harvard Institute for International Development (1989).
- Peneliti Institut Manajemen Fakultas Ekonomi UI (1989–1990).
- Peneliti Pusat Antar Universitas Ekonomi FE UI (1993–1995).
- Staf Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM) Kementerian Keuangan (1992–1997).
- Ekonom Citibank Indonesia (1997–2000).
- Senior Economic Adviser untuk Duta Besar Inggris di Indonesia (2000–2003).
- Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas (2005–2011).
- Peneliti dan pengajar Fakultas Ekonomi UI (2005–2006).
- Kepala Ekonom Bank Mandiri (2011–2015).
- Ketua Satgas Ekonomi Kementerian BUMN (2014–2015).
- Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK (2015).
- Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (2019–sekarang).



Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan kepada Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, sinyal jadi pimpinan baru bank sentral Indonesia, Kamis (30/7/2026). Ist

penilaian publik atas kinerja Destry, namun menegaskan keputusan akhir berada di tangan DPR.

"Kayaknya gimana? Oke? Terserah DPR nanti ya kira-kira," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut dinilai berkaitan erat dengan mekanisme pengisian jabatan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam aturan tersebut, apabila gubernur BI mengundurkan diri di tengah masa jabatan, Deputy Gubernur Senior menjalankan tugas sebagai pejabat sementara. Selanjutnya Presiden mengusulkan nama calon gubernur kepada DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebelum memperoleh persetujuan.

Meski belum ada pengumuman resmi dari Istana mengenai nama calon yang akan diajukan, pernyataan Prabowo semakin menguatkan spekulasi bahwa Destry menjadi kandidat utama menggantikan Perry Warjiyo.

Kata Ekonom

Sejumlah ekonom pun menilai Destry memiliki peluang paling besar. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut Destry sebagai figur yang paling siap memimpin BI karena memiliki risiko transisi paling rendah di tengah ketidakpastian ekonomiglobal.

Menurut Josua, pengalaman panjang Destry di Bank Indonesia membuatnya memahami proses perumusan kebijakan moneter, tata kelola operasional, komunikasi dengan pelaku pasar, hingga pengambilan keputusan saat menghadapi gejolak ekonomi.

"Dalam penilaian saya, Destry Damayanti merupakan figur yang

paling siap dan memiliki risiko transisi paling rendah untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia berikutnya. Penilaian ini bukan berarti beliau otomatis harus ditetapkan, terlebih pemerintah hingga kini belum mengajukan nama calon pengganti secara resmi," kata Josua.

Ia menambahkan, calon gubernur BI harus memiliki pengalaman menghadapi dinamika nilai tukar, inflasi, arus modal, likuiditas perbankan, serta krisis keuangan. Kemampuan akademik, menurutnya, perlu diimbangi pengalaman praktis dalam mengambil keputusan di pasar.

Josua juga mengingatkan bahwa proses seleksi harus berlangsung transparan agar independensi Bank Indonesia tetap terjaga dan kepercayaan pelaku pasar tidak terganggu.

"Dari sisi pengalaman dan kesinambungan, Destry merupakan kandidat yang sangat kuat. Namun proses pemilihannya tetap harus terbuka, terukur, dan bebas dari kesan sebagai penunjukan politik karena kualitas proses pemilihan akan sama pentingnya dengan nama yang akhirnya dipilih," ujarnya.

Destry Damayanti merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia dan meraih gelar Master of Science dari Cornell University, Amerika Serikat. Sebelum bergabung dengan Bank Indonesia, ia pernah menjabat sebagai Senior Economic Adviser Kedutaan Besar Inggris, Chief Economist Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas, Ketua Task Force Ekonomi BUMN, serta Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Destry diangkat sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019 dan dilantik pada 7

Agustus 2019. Setelah masa jabatannya diperpanjang, kini ia menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI sambil menunggu Presiden mengajukan calon gubernur definitif kepada DPR sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara Ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli menilai pengalaman saja tidak cukup. Menurutnya, pemimpin bank sentral harus memiliki keberanian, kejujuran, dan mampu menyampaikan kondisi ekonomi secara apa adanya kepada publik maupun pelaku pasar.

"Paling penting adalah berbicara apa adanya. Terutama di konteks situasi rupiah melemah. Karena kalau ingin rupiah kuat, BI tidak bisa sendirian. Jangan sampai kultur BI rusak karena Gubernur BI yang salah," kata Dipo, Kamis (30/7/2026).

Sementara itu, ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafni menilai sosok Gubernur Bank Indonesia harus mampu memperoleh kepercayaan pasar. Menurutnya, terdapat tiga nama yang memiliki peluang untuk menduduki kursi gubernur BI, yakni Destry Damayanti, Muliaman Hadad, dan Aida S. Budiman.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurrahman. Ia menilai kredibilitas calon Gubernur BI harus diukur dari sedikitnya empat aspek utama, yakni rekam jejak teknokratik, pemahaman mendalam mengenai operasi moneter, independensi dari kepentingan politik, serta tingkat penerimaan di pasar keuangan.

"Dalam situasi nilai tukar yang rentan dan ketidakpastian global yang tinggi, figur yang memiliki pengalaman kuat di bank sentral atau sektor keuangan akan lebih mampu menjaga kesinambungan kebijakan dan meminimalkan risiko kejutan pasar," ujar Rizal.

Namun, Rizal menegaskan bahwa pengalaman semata tidak cukup. Menurutnya, Gubernur BI harus tetap menjaga independensi lembaga dan berani mengambil keputusan meski tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemerintah.

"Koordinasi fiskal dan moneter memang penting, tetapi koordinasi tidak boleh berubah menjadi subordinasi. Gubernur BI harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer bagi pemerintah, terutama ketika stabilitas rupiah, inflasi, dan kepercayaan investor sedang dipertaruhkan," katanya. (tin,ktn,ist/dya)

Sinyal itu disampaikan saat Prabowo menghadiri acara akad massal 62.000 unit KPR subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden meluruskan penyebutan jabatan Destry yang sebelumnya masih disebut sebagai Deputy Gubernur Senior BI oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

"Ibu Destry sekarang adalah Pejabat Gubernur Sementara. PGS singkatannya," kata Prabowo.

Ucapan tersebut merujuk pada penugasan Destry sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI sejak Senin (27/7/2026), menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia sebelum masa tugasnya berakhir.

Setelah hadirin memberikan tepuk tangan, Prabowo kembali melontarkan komentar yang memicu spekulasi mengenai peluang Destry memimpin bank sentral secara definitif. Presiden seolah meminta

Dinkes Kota Malang Genjot Kesembuhan 200 Warga yang Positif TB



Dari yang suspek atau yang diduga memiliki gejala TB, ditemukan sekitar 200 orang yang sudah positif," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif, Kamis (30/7/2026).

Untuk memastikan penanganan berjalan lebih efektif, dikatakannya, seluruh data temuan kasus tersebut telah diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis support system dashboard. Melalui sistem tersebut, pemerintah di tingkat kewilayahan dapat

mantau perkembangan kasus TB secara langsung.

Menurut Husnul, lurah maupun camat dapat mengetahui jumlah warga yang masih berstatus suspek, jumlah pasien yang telah terkonfirmasi TB, hingga persentase penyebaran kasus di masing-masing wilayah.

"Sehingga lurah dan camat bisa melihat wilayahnya yang terduga TB berapa, kemudian yang terdeteksi TB

berapa, persentasenya seperti apa, apakah tergolong rendah atau bagaimana," katanya.

Meski demikian, Husnul mengaku pihaknya belum dapat mengevaluasi tingkat keberhasilan pengobatan pasien TB yang ditemukan sepanjang 2026 ini. Hal itu karena terapi TB membutuhkan waktu minimal 6 bulan sebelum hasil pengobatan dapat dievaluasi.

"Katakanlah penemuannya Januari, maka evaluasi keberhasilan maupun hasil pengobatannya baru bisa dilakukan pada akhir Juli atau awal Agustus," jelas Husnul.

Sebagai gambaran, Husnul memaparkan angka keberhasilan pengobatan TB di Kota Malang sepanjang 2025 telah mencapai 85 persen. Capaian tersebut masih berada di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 90 persen.

Karena itu, pada 2026 Dinkes menargetkan peningkatan keberhasilan pengobatan agar mampu menyamai standar nasional. "Di tahun 2025 angka keberhasilan pengobatan TB Kota Malang mencapai 85 persen. Tahun ini kami berupaya

meningkatkan menjadi 90 persen sesuai target nasional," ungkapnya.

Di sisi lain, upaya pencegahan penularan TB di Kota Malang mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Hal itu disampaikan saat kunjungan Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus ke Puskesmas Cisadea.

Apresiasi tersebut diberikan karena capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) Kota Malang telah mencapai 68 persen. Program TPT menasar masyarakat yang memiliki kontak erat dengan penderita TB agar mendapat terapi pencegahan sehingga risiko berkembang menjadi TB aktif dapat ditekan.

"Misalnya ada 1.000 orang yang kontak erat dengan penderita TB, maka sekitar 680 orang di antaranya sudah mendapatkan terapi pencegahan," terang Husnul.

Selain capaian TPT, Puskesmas Cisadea juga telah dilengkapi fasilitas Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk mempercepat diagnosis TB. Namun, fasilitas tersebut belum tersedia di seluruh 16 puskesmas di Kota Malang. (Santi/Dya)

Lahan 18 Hektare di Dampit Siap untuk Sekolah Nasional Terintegrasi

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyiapkan lahan seluas 18 hektare di Kecamatan Dampit untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Seluruh pembangunan akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai investasi mendekati Rp300 miliar.

Sebagai salah satu syarat administrasi, Pemkab Malang telah meminta dukungan resmi dari DPRD Kabupaten Malang terkait penyediaan lahan tersebut. "Salah satu item dari 11 item yang harus kita penuhi adalah dukungan dari DPRD untuk pendirian sekolah di sini," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Harawanto, dikutip pada Kamis (30/7/2026).

Dijelaskannya, lahan yang disiapkan merupakan aset milik Pemkab Malang di Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit. Awalnya, pemerintah pusat mengusulkan kebutuhan lahan seluas 20 hingga 30 hektare. Namun setelah dilakukan survei lapangan, luas tersebut dinilai dapat disesuaikan menjadi 18 hektare.

"Kalau dari konsep pemerintah pusat itu minimal Pemda menyediakan 20 sampai 30 hektare. Kami punya sekitar 50 hektare di lokasi itu. Setelah dicek, ternyata tidak sampai 20 hektare pun sudah cukup. Maka diputuskan menggunakan 18 hektare untuk Sekolah Nasional Terintegrasi," jelasnya.

Menurut Tomie, seluruh biaya pembangunan maupun penyediaan fasilitas pendidikan akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Nilai investasi pembangunan fisik diperkirakan mencapai sekitar Rp250 miliar, sementara jika termasuk operasional total anggarannya mendekati Rp300 miliar. "Semua dari APBN, sedangkan pemerintah daerah hanya menyediakan lahannya," katanya.

Tomie menjelaskan, Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut nantinya akan melayani jenjang SMP dan SMA. Meski memiliki fasilitas lengkap dan standar pendidikan tinggi, sekolah ini tidak menerapkan sistem asrama (boarding school) seperti Sekolah Rakyat (SR) yang juga menjadi program pemerintah pusat,

melainkan sekolah reguler yang disiapkan untuk mencetak lulusan berdaya saing global.

Seleksi peserta didik, lanjutnya, akan diprioritaskan bagi siswa asal Kabupaten Malang melalui mekanisme tes kemampuan. "Pesertanya dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang, tetapi harus melalui tes. Sekolah ini dipersiapkan agar anak-anak memiliki visi global, termasuk pembelajaran bahasa Inggris dan Mandarin," terang Tomie.

Ia menambahkan, kawasan pendidikan tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti laboratorium hingga sarana olahraga, yang juga dapat dimanfaatkan sekolah lain di Kabupaten Malang.

Apabila seluruh persyaratan dapat dipenuhi sesuai jadwal, pembangunan ditargetkan mulai dilaksanakan sebelum akhir tahun 2026.

Diketahui, secara nasional pemerintah menargetkan pem-



angunan 500 Sekolah Nasional Terintegrasi secara bertahap hingga 2029. Pada 2026, pembangunan direncanakan berlangsung di 37 lokasi, dengan 17 lokasi ditargetkan mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, memastikan legislatif mendukung penuh rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Dampit karena dinilai mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Malang. (Santi/Dya)

DAFTAR NEGARA TERDAMPAK KONFLIK



Iran

- **Diserang:** AS & Israel
- **Dampak:** 3.600+ tewas (termasuk Ayatullah Ali Khamenei & 2.100+ sipil), puluhan ribu luka.



Lebanon

- **Diserang:** Israel
- **Dampak:** 4.000+ tewas, termasuk pejuang Hizbullah & warga sipil.



Yordania

- **Diserang:** Iran
- **Dampak:** Pangkalan militer rusak, ada korban tentara AS.



Uni Emirat Arab

- **Diserang:** Iran
- **Dampak:** Drone menghantam Palm Jumeirah & Jebel Ali, 1 sipil tewas.



Arab Saudi

- **Diserang:** Iran
- **Dampak:** Kilang minyak Ras Tanura diserang, operasional terganggu.



Kuwait

- **Diserang:** Iran
- **Dampak:** Pelabuhan Suwaiba diserang, 7+ warga tewas.



Qatar

- **Diserang:** Iran
- **Dampak:** Dua fasilitas energi rusak, produksi gas sempat berhenti.



Bahrain

- **Diserang:** Iran
- **Dampak:** Kompleks militer rusak, rudal mengenai permukiman.



Irak

- **Diserang:** Iran (drone)
- **Dampak:** Fasilitas rusak, 1 tentara AS tewas.



Oman

- **Diserang:** Iran (diduga)
- **Dampak:** Pelabuhan diserang, 1 pelaut India tewas.

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada Kamis (30/7/2026) mengumumkan telah menuntaskan "gelombang serangan berat" yang menasar puluhan fasilitas militer IRGC. Target operasi meliputi pusat komando militer, fasilitas rudal balistik dan pesawat nirawak (drone), sistem pertahanan serta pengawasan pesisir, hingga kemampuan maritim Iran.

Militer AS menyebut operasi tersebut merupakan balasan atas serangan rudal balistik Iran sehari sebelumnya yang ditujukan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Menurut CENTCOM, seluruh rudal Iran berhasil dicegat sehingga tidak menimbulkan korban di pihak AS.

PERANG MELUAS! AS GEMPUR IRAN, TEHERAN SERANG KUWAIT

Sinyal diplomasi yang sempat muncul dalam beberapa hari terakhir kembali memudar. Amerika Serikat dan Iran justru memasuki babak baru konfrontasi militer setelah Washington melancarkan gelombang serangan udara berskala besar ke sejumlah sasaran strategis Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Teheran merespons dengan memperluas sasaran serangan ke kawasan Teluk, membuat kekhawatiran terhadap meluasnya perang di Timur Tengah kembali menguat.



Tentara Lebanon berjaga di kota Zawtar al-Gharbiyeh, Lebanon selatan, setelah penarikan pasukan Israel berdasarkan rencana yang dimediasi AS, 26 Juli 2026. (AP)

"Termasuk pusat komando militer, fasilitas rudal dan drone, situs pengawasan dan pertahanan pesisir, serta kekuatan maritim," demikian pernyataan resmi CENTCOM mengenai sasaran operasi.

Serangan berlangsung sekitar satu jam, dimulai pukul 20.00 waktu setempat pada Rabu (29/7/2026). Citra yang dirilis CENTCOM memperlihatkan pesawat-pesawat tempur lepas landas untuk menjalankan operasi yang diklaim sebagai respons atas "percobaan serangan Iran terhadap pasukan Amerika yang ditempatkan di Timur Tengah."

Di pihak lain, media pemerintah Iran memberikan gambaran berbeda. Kantor berita IRIB dan Fars melaporkan sejumlah wilayah di Iran bagian selatan dan barat menjadi sasaran pemboman, termasuk Pulau Qeshm di dekat Selat Hormuz dan kawasan industri minyak Abadan.

Universitas Kedokteran Hormozgan, sebagaimana dikutip media pemerintah Iran, menyatakan satu serangan di kawasan permukiman Chah Tangu, Pulau Qeshm, menewaskan satu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak mereka yang baru berusia dua tahun.

Korban sipil itu menambah daftar panjang dampak kemanusiaan dari konflik yang telah berlangsung sekitar lima bulan. Ketika operasi militer pertama terhadap Iran dimulai pada Februari lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang diperkirakan hanya berlangsung beberapa pekan. Namun hingga akhir Juli, konflik justru semakin melebar tanpa tanda-tanda penyelesaian.

Gelombang serangan terbaru tidak berdiri sendiri. Sehari sebelumnya, Amerika Serikat bersama Arab Saudi meluncurkan operasi terhadap sejumlah fasilitas kelompok milisi Syiah yang didukung Iran di Irak timur.

CENTCOM menyatakan operasi gabungan itu menghancurkan sejumlah gudang logistik dan persenjataan sebagai respons atas lebih dari 30 serangan drone yang diarahkan IRGC dalam kurun 72 jam.

Sebaliknya, Pasukan Mobilisasi Populer (Popular Mobilization Forces/PMF) Irak mengatakan sedikitnya 20 anggotanya tewas akibat serangan tersebut.

Presiden Irak mengecam pemboman itu sebagai pelanggaran

nyata terhadap kedaulatan negaranya. Namun Trump dalam wawancara dengan Fox News mengklaim operasi telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Irak.

Konflik kemudian menjalar ke jalur pelayaran internasional. IRGC menyatakan telah menyerang tiga kapal tanker minyak di Selat Hormuz yang disebut mengabaikan peringatan otoritas Iran.

Dalam perkembangan terbaru, IRGC kembali menegaskan Selat Hormuz tetap ditutup dan tidak akan dibuka selama ancaman Amerika Serikat beserta sekutunya masih berlangsung.

"Selat Hormuz tidak akan dibuka selama retorika dan ancaman AS terus berlangsung."

Pernyataan itu meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan salah satu jalur energi terpenting dunia.

Berdasarkan data International Energy Agency, sekitar seperlima perdagangan minyak global setiap hari melewati Selat Hormuz. Gangguan di kawasan ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia dan mengganggu rantai pasok energi internasional. (gus, wsh rtr/dya)

Dokter Ingatkan Dampak Buruk Tren Makanan Pedas

Fenomena makanan dengan tingkat kepedasan ekstrem ramai di perbincangkan di media sosial. digemari masyarakat dari usia anak-anak hingga dewasa. Padahal, di balik sensasi dan popularitasnya, konsumsi makanan pedas tanpa memperhatikan kondisi tubuh dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Terutama pada usia dini yang sistem pencernaannya masih berkembang.

Konsultan Gastroenterohepatologi Anak Eka Hospital MT Haryono, dr. Eva Jeumpa Soelaeman, mengingatkan para orang tua agar tidak membiarkan anak mengikuti tren mengonsumsi makanan pedas yang sedang viral hanya karena rasa penasaran atau pengaruh lingkungan. Menurutnya, kesehatan anak harus menjadi pertimbangan utama dibanding mengikuti gaya hidup yang sedang populer.

"Jangan karena pengaruh gaya hidup dan mencoba makanan pedas yang viral, membuat kesehatan anak terganggu. Bahkan, tumbuh kembangnya jadi terganggu," kata dr. Eva Jeumpa Soelaeman di Tangerang, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa saluran pencernaan anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Organ pencernaan pada anak masih berada dalam tahap pertumbuhan sehingga lebih sensitif terhadap berbagai faktor yang dapat memicu gangguan kesehatan. Kondisi tersebut membuat anak lebih rentan mengalami masalah pencernaan apabila mengonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan usianya atau dikonsumsi secara berlebihan.

Menurut dr. Eva, sistem pencernaan anak memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap infeksi, alergi, maupun kelainan struktural. Karena itu, kesalahan dalam pola makan dapat memicu berbagai gangguan yang sering kali muncul secara berulang. Beberapa keluhan yang umum dialami antara lain sakit perut berulang, mual, sulit buang air besar (BAB),

hingga berat badan yang tidak mengalami peningkatan sebagaimana mestinya.

"Sistem pencernaan anak belum sematang orang dewasa. Jika anak mengalami kondisi tersebut, segeralah berkonsultasi dengan dokter gastro anak karena dokter spesialis ini memahami sistem pencernaan anak secara mendalam," ujarnya.

Lebih lanjut, dr. Eva menerangkan bahwa dokter gastro anak atau dokter spesialis anak konsultan gastroenterohepatologi merupakan dokter yang telah menempuh pendidikan subspecialisasi untuk menangani berbagai gangguan pada sistem pencernaan anak secara komprehensif.

Penanganan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada lambung dan usus, tetapi juga mencakup seluruh organ pencernaan, mulai dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga organ hati (liver) dan pankreas pada bayi, anak-anak, maupun remaja.

Berbagai penyakit yang

menjadi ruang lingkup penanganan dokter gastro anak meliputi gangguan saluran cerna bagian atas beserta gejala umumnya, gastroesophageal reflux disease (GERD), kesulitan menelan, muntah berulang maupun muntah darah, sakit perut kronis, gangguan kenaikan berat badan, gangguan makan, infeksi saluran pencernaan, radang pencernaan kronis, hingga berbagai kelainan pada hati dan saluran empedu anak.

Dalam proses diagnosis, dokter juga dapat melakukan pemeriksaan endoskopi apabila diperlukan untuk mengetahui kondisi saluran pencernaan secara lebih detail. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan selang fleksibel berukuran kecil yang dilengkapi kamera atau endoskop sehingga dokter dapat melihat kondisi bagian dalam saluran cerna secara langsung.

Meski memiliki prinsip kerja yang sama seperti prosedur pada orang dewasa, pelaksanaan endoskopi pada anak membutuhkan penanganan yang berbeda agar sesuai dengan kondisi pasien usia anak.

"Meskipun prinsip kerjanya sama dengan orang dewasa, endoskopi pada anak

memiliki perbedaan dari ukuran alat, bius lokal hingga tim medis khusus," ujarnya.

Dr. Eva menekankan bahwa orang tua perlu lebih cermat mengawasi pola makan anak, termasuk membatasi konsumsi makanan pedas yang tengah menjadi tren. Apabila anak mengalami keluhan pada saluran pencernaan secara berulang setelah mengonsumsi makanan tertentu, pemeriksaan sejak dini ke dokter spesialis gastroenterohepatologi anak menjadi langkah penting agar penyebabnya dapat diketahui dan ditangani dengan tepat. (farist/dya)

Langkah Awal: Pertolongan Pertama

Beri Minum Susu atau Produk Olahannya

Fakta: Kandungan kasein pada susu efektif mengikat dan menetralkan capsaicin (senyawa penyebab pedas) yang menempel di organ pencernaan.

Berikan Air Hangat atau Air Kelapa

Membantu membasir sisa capsaicin di lambung dan menggantikan cairan tubuh jika anak mulai mual atau diare.

Istirahatkan Posisi Tubuh Anak

Biarkan anak duduk tegak atau berbaring miring (posisi meringkuk) untuk meredakan kram perut. Hindari berbaring terlentang rata agar asam lambung tidak naik.

Kompres Hangat Area Perut

Tempelkan handuk hangat atau botol berisi air hangat yang dibungkus kain di atas perut anak untuk merelaksasi otot pencernaan yang tegang.



Peneliti Kembangkan 'Stop Kontak' di Bawah Kulit untuk Medis

Kemajuan teknologi bioelektronik membuka peluang baru dalam dunia kedokteran. Para peneliti dari University of California, Irvine (UC Irvine), Amerika Serikat, mengembangkan sebuah perangkat implan yang bekerja layaknya "stop kontak" di bawah kulit manusia.

Teknologi ini dirancang agar perangkat medis yang ditanam di dalam tubuh dapat diisi ulang, dirawat, atau diambil datanya tanpa harus menjalani operasi berulang.

Perangkat tersebut diberi nama Implantable Bioelectronic Outlet (IBO). Bentuknya berupa titik akses listrik yang ditanam di bawah kulit dan tetap tersembunyi selama berada di dalam tubuh. Ketika diperlukan, dokter hanya perlu memasukkan jarum suntik khusus untuk menghubungkan perangkat medis dengan sumber daya atau sistem pembaca data, kemudian jarum tersebut segera dilepas setelah prosedur selesai.

Inovasi ini dipimpin oleh Dion Khodagholy, Associate Professor Teknik Elektro dan Ilmu Komputer di UC Irvine. Hasil penelitian telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Science Advances pada awal Juli 2026 dan dinilai sebagai salah satu terobosan yang berpotensi mengubah cara perawatan berbagai perangkat medis implan di masa depan.

Dalam keterangan resmi UC Irvine, Khodagholy menjelaskan bahwa IBO mampu menghantarkan rangsangan listrik dengan efisiensi yang sangat tinggi. Menurutnya, performa alat tersebut hampir setara dengan

menyambungkan kabel secara langsung ke perangkat yang berada di dalam tubuh.

"IBO mampu memberikan rangsangan secara sangat efektif, seolah-olah Anda menyambungkan kabel secara langsung. Hal ini sangat menarik karena tidak hanya dapat digunakan untuk tujuan diagnostik, tetapi mungkin juga dapat mendukung terapi yang memerlukan dosis rangsangan tertentu setiap hari," ujar Dion Khodagholy.

Selama ini, banyak perangkat medis implan seperti pacemaker, stimulator saraf, implan retina, cochlear implant, sensor biologis, hingga berbagai neural interface masih menghadapi kendala dalam hal pengisian daya maupun pemeliharaan.

Pada beberapa perangkat, baterai yang habis sering kali mengharuskan pasien menjalani operasi lanjutan untuk mengganti komponen tertentu. Prosedur tersebut tidak hanya meningkatkan biaya pengobatan, tetapi juga membawa risiko infeksi, komplikasi, serta memperpanjang masa pemulihan pasien.

IBO dikembangkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Perangkat ini berfungsi sebagai titik akses universal yang kompatibel dengan berbagai jenis sensor medis, stimulator listrik, antarmuka saraf (neural interface), maupun perangkat implan berbasis baterai lainnya.

Dengan adanya satu akses listrik permanen di bawah kulit, dokter tidak lagi harus melakukan pembedahan setiap kali perangkat membutuhkan pengisian ulang atau pembaruan data.



Menurut laporan TechRadar, komponen utama IBO dibuat dari spons plastik lunak berpori dengan ukuran sekitar 150 mikrometer, hampir setara dengan diameter jarum suntik halus. Struktur berpori tersebut kemudian dilapisi polimer konduktif yang memiliki kemampuan menghantarkan listrik sangat baik. Seluruh komponen selanjutnya dibungkus menggunakan silikon medis yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus isolator agar arus listrik tetap aman bagi jaringan tubuh.

Beberapa lapisan spons konduktif disusun menjadi satu kesatuan sehingga mampu mempertahankan performa listrik sekaligus tetap fleksibel mengikuti

gerakan jaringan tubuh. Desain tersebut juga membantu mengurangi risiko kerusakan akibat tusukan jarum yang dilakukan berulang kali.

Peneliti UC Irvine, Hyung Joon Shim, menjelaskan bahwa perangkat memang dirancang agar sepenuhnya tersembunyi di bawah kulit. Jarum hanya dimasukkan ketika tenaga medis membutuhkan akses listrik atau transfer data, kemudian segera dicabut setelah prosedur selesai sehingga pasien tetap dapat beraktivitas seperti biasa.

Sebelum dapat diterapkan pada manusia, teknologi tersebut telah melalui serangkaian pengujian pada hewan laboratorium. Dalam uji coba menggunakan mencit dan tikus, (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I SIDAARJO: TEGUH A I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: AIS I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I TRENGGALEK: HERLAMBAH I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Dupe Culture, Bukan Barang KW tapi Duplikasi

Sebotol parfum dengan aroma menyerupai merek mewah seharga Rp60 ribu. Lip tint lokal yang disebut-sebut memiliki hasil akhir mirip produk selebritas Hollywood. Tas bergaya rumah mode Eropa yang dijual murah meriah.

Pemandangan seperti ini kini semakin lazim ditemukan di etalase pusat perbelanjaan, marketplace, hingga linimasa TikTok dan Instagram.

Di tengah kenaikan biaya hidup dan semakin kuatnya pengaruh media sosial terhadap gaya hidup, muncul satu istilah yang kian akrab di telinga konsumen, terutama Generasi Z dan milenial yaitu dupe.

Fenomena ini bukan sekadar tren belanja murah. Ia mencerminkan perubahan cara masyarakat memandang nilai sebuah produk. Jika dahulu logo dan prestise merek menjadi penentu utama, kini banyak konsumen lebih mengutamakan fungsi, kualitas, serta harga yang dianggap masuk akal.

Berbeda dengan barang palsu atau produk KW, dupe merupakan produk yang hanya mengambil inspirasi dari produk premium tanpa menggunakan nama, logo, maupun identitas merek aslinya. The Fashion Law mendefinisikan dupe singkatan dari duplicate sebagai produk yang menyerupai produk lain yang lebih mahal,

baik dari sisi tampilan, fungsi, maupun aroma, tetapi dijual dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Karena tidak memalsukan identitas merek, produk dupe secara hukum berada di wilayah yang berbeda dibanding barang tiruan ilegal.

Popularitas dupe tidak dapat dilepaskan dari perkembangan media sosial.

TikTok, Instagram, hingga YouTube dipenuhi video bertajuk "dupe check", "save or splurge", dan "luxury alternatives" yang membandingkan produk premium dengan versi yang jauh lebih murah. Kreator konten berlomba mengulas apakah suatu produk benar-benar memiliki kualitas yang setara dengan harga yang lebih bersahabat.

Reporter senior The Verge, Mia Sato, menyebut dupe culture sebagai konsekuensi logis dari internet yang memungkinkan siapa pun menemukan alternatif produk dengan harga lebih rendah.

"Dupe culture adalah konsep bahwa internet memungkinkan orang menemukan alternatif yang lebih murah, sebuah tiruan, atau pengganti yang layak dari barang yang

sebenarnya mereka inginkan." Algoritma media sosial kemudian mempercepat penyebaran tren tersebut. Satu video ulasan dapat ditonton jutaan kali dan langsung memicu lonjakan permintaan terhadap produk yang disebut sebagai "dupe terbaik".

Di TikTok sendiri, tagar seperti #dupe, #beautydupe, #perfumedupe, dan #luxurydupe telah mengumpulkan miliaran tayangan secara global. Fenomena ini membuat konsumen semakin mudah menemukan alternatif produk hanya dalam hitungan detik.

Data Statista pada 2025 menunjukkan bahwa kategori produk yang paling banyak memiliki versi dupe berasal dari sektor fesyen dan kecantikan. Pakaian, tas, dan sepatu berada di posisi teratas, disusul parfum, kosmetik, serta skincare.

Fesyen menjadi sektor yang paling mudah melahirkan dupe karena desain dapat diinterpretasikan dalam berbagai bentuk selama tidak melanggar hak kekayaan intelektual.

Sebaliknya, produk skincare lebih kompleks karena harus menghadirkan formulasi dengan

kandungan aktif yang mampu menghasilkan performa serupa. Meski demikian, industri kecantikan berkembang sangat cepat sehingga alternatif baru terus bermunculan.

Produk yang Digemari

Fenomena dupe kini hampir ditemukan di seluruh kategori gaya hidup. Di kategori parfum, salah satu contoh paling populer adalah British Pear dari Miniso yang kerap disebut memiliki karakter aroma menyerupai Jo Malone English Pear & Freesia.

Dengan harga sekitar Rp60 ribu, produk tersebut menjadi alternatif bagi konsumen yang belum mampu membeli parfum Jo Malone yang dibanderol hingga jutaan rupiah.

Selain Miniso, lini parfum Zara juga dikenal luas sebagai produsen parfum dupe. Sejumlah variannya sering dibandingkan dengan parfum premium dari Maison Francis Kurkdjian, Yves Saint Laurent (YSL), Dior, hingga Tom Ford karena memiliki karakter aroma yang dinilai mirip dengan harga beberapa ratus ribu rupiah. (far,ist/dya)



MK Ketok Palu: ...dari Hal 1

Perkara yang diajukan oleh pemohon Sa'ed Sipghotulloh Mujaddidi ini menyasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Mahkamah memang tidak membatalkan keberadaan Program MBG itu sendiri. Di atas kertas, hakim sepakat bahwa pemenuhan piring gizi anak sekolah, perbaikan derajat kesehatan, hingga penekanan angka stunting adalah urusan yang konstitusional dan perlu sokongan negara.

Namun, MK memberikan penegasan terkait skema pembiayaan program tersebut. Penggunaan anggaran pendidikan yang dijamin oleh Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis dinilai tidak sesuai dengan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan.

Mahkamah menegaskan bahwa meskipun sasaran Program MBG adalah peserta didik dan dilaksanakan di lingkungan sekolah, program tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial dan pemenuhan gizi, bukan komponen operasional penyelenggaraan pendidikan. Atas dasar pertimbangan tersebut, MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memisahkan pos anggaran MBG dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028, dengan memberikan masa transisi maksimal dua tahun.

"Pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028 atau paling lama dua tahun sejak putusan a quo diucapkan."

Garis tegas ini menyudahi polemik sejak pemerintah menyisipkan MBG dalam belanja pendidikan di APBN 2026. Sejak awal mula, rekayasa klasifikasi anggaran ini diujani kritik tajam oleh kalangan akademisi, kelompok sipil, ekonom, hingga pemerhati kebijakan publik. Memperluas definisi anggaran kependidikan demi menampung belanja pangan harian dinilai berisiko menggerus ruang fiskal murni yang mestinya dipakai membangun sekolah rubuh, menaikkan gaji guru honorer, hingga pemerataan akses belajar di wilayah terisolasi.

Pangkal kelindan kasus ini bersumber dari Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) UU 17/2025 tentang APBN TA 2026. Di bagian penjelasan itu, pemerintah dan DPR menyelipkan tafsir bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan mencakup Program Makan Bergizi Gratis pada lembaga-lembaga pendidikan.

Bagi MK, menyisipkan definisi MBG di bagian penjelasan UU bukan lagi sekadar memperjelas norma,

melainkan menyelundupkan norma baru yang tidak ada pada batang tubuh UU. Dalam kaidah hukum tata negara dan pembentukan undang-undang, bagian penjelasan bertindak sebatas penyuluh, dilarang melompat menjadi pembuat hukum baru.

"Penjelasan seharusnya menjadi sarana untuk memperjelas maksud norma atau lingkup ketentuan dalam batang tubuh. Bukan untuk menambah, mengubah, apalagi memperluas substansi pengaturan."

Melalui pertimbangan yang dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, MK mengurai ulang anatomi ruh operasional kependidikan. Poin-poin dasarnya mencakup elemen yang langsung menyokong proses belajar mengajar: peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana-prasarana, hingga sistem evaluasi.

Atas anatomi tersebut, MK menyimpulkan MBG tidak punya cantolan langsung sebagai organ utama operasional pendidikan.

"Program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN," tegas Enny Nurbaningsih.

Hakim menekankan bahwa menumpang fasilitas tempat di sekolah tak serta-merta mengubah tabiat hukum sebuah program. Imunisasi massal atau pemeriksaan gigi siswa juga kerap bertempat di sekolah, tetapi rezim hukum dan anggarannya tetaplah milik pos kesehatan, bukan kependidikan. Memasukkan MBG ke pos pendidikan hanya karena ia dibagikan di kelas dinilai sebagai perluasan tafsir konstitusi yang kelewat jauh.

Sedot Rp223,6 Triliun

Rincian angka dalam APBN 2026 mendedahkan alasan mengapa MK bersikap keras. Tahun ini, anggaran pendidikan dipatok sebesar Rp769,1 triliun atau pas 20 persen dari APBN. Namun, porsi jumbo sebesar Rp223,6 triliun di dalamnya disedot untuk membiayai piring MBG yang dieksekusi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Mahkamah sempat melakukan simulasi matematis: jika porsi Rp223,6 triliun itu ditendang keluar dari pos pendidikan, maka persentase belanja pendidikan murni otomatis anjlok jauh di bawah batas wajib 20 persen APBN.

"Apabila disimulasikan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan program MBG dikeluarkan dari pos anggaran pendidikan, maka persentase keseluruhan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari

APBN menjadi tidak tercapai."

Artinya, keputusan pemerintah memasukkan MBG ke pos pendidikan tak lain adalah jalan pintas administrasi demi mengejar angka formalis 20 persen tanpa perlu menambah belanja baru. Padahal, potret riil lapangan menunjukkan sektor pendidikan nasional sedang sekarat: ribuan ruang kelas rusak berat, kesenjangan sarana antardaerah yang menganga, akses internet minim, serta jeritan guru honorer yang tak kunjung terangkat kesejahteraannya--suatu realitas yang berulang kali disorot laporan BPK hingga evaluasi internal Kementerian Pendidikan.

Mahasiswa Kecewa-Istana Hormati Putusan

Di luar ruang sidang, putusan MK menuai reaksi berlapis. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyambut baik posisi hakim yang mengembalikan marwah Pasal 31 UUD 1945.

"JPPI menyambut baik putusan ini karena MK akhirnya menegaskan bahwa MBG bukan komponen utama pendidikan. Ini merupakan kemenangan penting bagi perlindungan anggaran pendidikan."

Namun, JPPI menyematkan kritik tebal pada bonus waktu (masa transisi) hingga APBN 2028 yang dipandang terlalu berbelit. Bagi JPPI, selagi APBN 2027 belum diketok, penyesuaian wajib dieksekusi secepatnya.

"Kalau MK sendiri mengakui bahwa APBN 2027 masih bisa disesuaikan, mengapa pemerintah diberi ruang menunggu sampai 2028? Kalau kekeliruan klasifikasi anggarannya sudah dinyatakan hari ini, koreksinya juga harus dilakukan secepatnya, bukan ditunda dua tahun," seru Ubaid.

"Putusan ini jangan dibaca sebagai lampu hijau untuk kembali menggunakan dana pendidikan pada 2027... Menunda sampai 2028 berarti memberi ruang satu tahun lagi bagi anggaran pendidikan untuk dibebani program nonpendidikan. Yang menanggung akibatnya bukan angka-angka dalam APBN, tetapi anak yang tidak mendapat bangku sekolah, guru yang digaji tidak layak, dan siswa yang belajar di ruang kelas rusak."

Nada lebih pedas disuarakan mahasiswa. Puluhan massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mengawal persidangan di Jalan Medan Merdeka Barat mencibir masa transisi tersebut sebagai bentuk kompromi yang menguap esensi kemenangan hukum.

Koordinator Bidang Sospol BEM UI, Hafidz Haernanda, secara terbuka melabeli vonis MK ini sebagai "kemenangan semu".

"Kenapa kemenangan yang semu?

Karena anggaran pendidikan masih akan terus digunakan oleh program makan bergizi gratis sampai tahun 2027," kata Hafidz di depan Gedung MK.

"Kami akan terus mendesak agar MBG bisa dikeluarkan saat ini juga, kalau perlu dari anggaran pendidikan. Jadi, untuk Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming, lihatlah kami yang sedang mengawal putusan ini. Lihatlah para mahasiswa yang telah beberapa hari yang lalu ingin menghentikan program ini. Lihatlah para siswa-siswa yang sedang kesusahan untuk belajar dikarenakan kelasnya itu buruk sekali untuk ditinggali belajar. Lihatlah siswa-siswa yang tidak bisa belajar dikarenakan sekolah mereka runtuh. Lihatlah anak SD di NTT yang telah bunuh diri dikarenakan ia tidak bisa menggunakan alat tulis tersebut."

Merespons tekanan publik dan vonis MK, pihak Istana memilih main aman dan hemat bicara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui pihaknya telah mendengar kabar putusan tersebut, tetapi enggan terburu-buru mengumbar langkah teknis.

Memberikan keterangan dari atas kereta KA Nusantara Explorer yang meluncur di wilayah Tegal, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026), Prasetyo menyatakan pemerintah bersikap menghormati keputusan badan peradilan konstitusi dan baru akan mengambil langkah strategis bersama kementerian/lembaga terkait usai memegang dan menelaah berkas fisik salinan putusan resmi.

"Terima kasih, kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah keputusan. Tapi memang, yang pertama, karena kami posisi sedang di luar kota, secara resmi kami belum menerima salinan keputusan tersebut," ujar Prasetyo.

Terpisah, Koalisi MBG Watch menilai putusan MK belum sepenuhnya menghentikan penggunaan dana pendidikan untuk program tersebut. Anggota MBG Watch Isnawati Hidayah mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa putusan MK belum serta-merta menghentikan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG.

"Masyarakat perlu mengetahui bahwa putusan yang melarang penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG baru berlaku pada 2028. Artinya, pada 2026 hingga 2027 masih terbuka ruang bagi ratusan triliun rupiah anggaran pendidikan untuk terus dialihkan. Ini bukan persoalan kecil," ujar Isnawati dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).

Isnawati menilai kondisi tersebut berpotensi mengurangi alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperkuat kualitas sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, dan mendukung proses pembelajaran. wud,rls,ant,kum/dya)

FAKTA BARU OTT PEMALANG: STAF KPK DAN BAPAKNYA PERAS BUPATI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Selain menetapkan Anom sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap anak buah dan pihak swasta, KPK juga mengusut dugaan pemerasan yang justru menimpa sang bupati. Pelakunya diduga merupakan seorang staf administrasi KPK bersama ayah kandungnya.



Empat tersangka OTT Pemalang mengenakan jaket oranye. Selain Bupati Pemalang Anom Widiyantoro juga menyeret staf KPK Setya Budi Dias Oktavianto. (Dok)

DAFTAR RESMI 4 TERSANGKA YANG DITAHAN

- **Anom Widiyantoro:**
Bupati Pemalang aktif (Klaster utama korupsi proyek dan jabatan).
- **Mohamad Haris (Gus Haris):**
Pihak swasta sekaligus orang kepercayaan bupati yang bertugas mengumpulkan dan menyeret dana suap.
- **Lilik Budi Suprianto:**
Pihak swasta/anggota LSM yang berperan sebagai makelar kasus.
- **Setya Budi Dias Oktavianto:**
Anak kandung Lilik, seorang anggota Polri aktif (Iptu Brimob) yang bertugas sebagai staf administrasi KPK sekaligus mantan ajudan pimpinan KPK. Ia berperan membocorkan dokumen rahasia KPK untuk menakut-nakuti Bupati.

dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Oknum tersebut adalah Setya Budi Dias Oktavianto, staf administrasi KPK yang berasal dari unsur Polri dan diperbantukan di lembaga antirasuah. Menurut Budi, status kepegawaiannya memang merupakan personel aktif Kepolisian yang bertugas di KPK.

"Yang bersangkutan merupakan staf administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang benar merupakan perbantuan dari instansi Kepolisian," ujarnya.

Dalam penyidikan, Setya Budi diduga bekerja sama dengan ayahnya, Lilik Budi Suprianto, seorang pihak swasta. KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan.

Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein memaparkan, dugaan pemerasan bermula dari hubungan keluarga. Orang kepercayaan Bupati Pemalang, Mohamad Haris alias Gus Haris, melalui adik iparnya yang berinisial HAH (Harun), diperkenalkan kepada Lilik Budi Suprianto.

"GHA (Gus Haris) sebagai representasi Bupati Pemalang

menemui saudara HAH (Harun) selaku adik iparnya untuk dikenalkan dengan saudara LBS (Lilik Budi Suprianto) selaku pihak swasta atau ayah dari saudara DIS (Setya Budi Dias) yang merupakan staf administrasi di KPK," ujar Ahmad Taufik Husein.

Setelah perkenalan itu, Lilik memanfaatkan status anaknya sebagai pegawai KPK untuk meyakinkan Anom Widiyantoro bahwa dirinya memiliki akses terhadap perkembangan perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah. Setya Budi diduga membocorkan informasi penanganan perkara kepada ayahnya melalui aplikasi pesan singkat.

Tiga Pertemuan, Minta Rp2 M

KPK mengungkap, setelah komunikasi awal tersebut, Anom Widiyantoro, Gus Haris, dan Lilik Budi Suprianto melakukan tiga kali pertemuan di restoran yang berada di wilayah Magelang dan Semarang.

Dalam pertemuan pertama, Lilik menawarkan bantuan mengurus perkara. Pada pertemuan berikutnya, ia kembali meyakinkan Anom bahwa kasus yang menjeratnya dapat diselesaikan apabila menyediakan sejumlah uang.

"Dalam pertemuan tersebut, LBS meminta uang pengurusan perkara sejumlah Rp2 miliar," kata Ahmad.

Ahmad menjelaskan, setelah diyakinkan oleh Lilik, Anom dan Gus Haris akhirnya sepakat menyiapkan dana yang diminta.

"Pada pertemuan kedua atau setelah AWI dan GHA diyakinkan bahwa LBS bisa mengurus perkara dimaksud, terjadi kesepakatan antara AWI dan GHA dengan LBS untuk menyiapkan uang tersebut agar perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang dapat diselesaikan," jelas Ahmad.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Anom melalui Gus Haris diduga mengumpulkan uang dari sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak swasta yang memiliki hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Hasil penyidikan menunjukkan dana yang berhasil dikumpulkan mencapai sekitar Rp1,98 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp1,2 miliar kemudian diserahkan kepada Lilik Budi Suprianto.

"Selanjutnya, dari pengumpulan uang yang dilakukan Bupati melalui GHA dari sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta tersebut, pada akhirnya diberikan senilai Rp1,2 miliar oleh GHA kepada LBS," ujar Ahmad.

Sementara itu, KPK masih menelusuri keberadaan sisa dana yang belum diketahui alirannya.

Meski kasus ini menyeret pegawainya sendiri, KPK menegaskan penanganan perkara akan tetap dilakukan tanpa pandang bulu.

"Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri," tegas Budi Prasetyo.

Hingga kini belum ada keterangan dari Setya Budi Dias Oktavianto maupun Lilik Budi Suprianto terkait penetapan mereka sebagai tersangka.

KPK menyita barang bukti senilai sekitar Rp2,7 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Barang bukti tersebut didominasi uang tunai yang ditemukan di sejumlah lokasi, serta buku rekening yang diduga digunakan sebagai rekening penampungan dana. (wid,ist,rls,ini/dya)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, perkara hasil OTT tersebut dibagi menjadi dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Anom Widiyantoro terhadap perangkat daerah dan rekanan swasta. Sementara klaster kedua menyangkut dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oknum pegawai KPK terhadap Anom.

"Klaster kedua yakni terkait